

**PENGARUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI DAN
POLITIK TERHADAP PEMBANGUNAN PEREMPUAN DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



Oleh:

ELSA YUNARA

2016/16060083

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

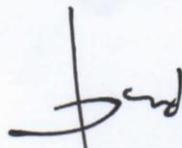
2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI DAN
POLITIK TERHADAP PEMBANGUNAN PEREMPUAN DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

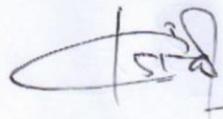
Nama : Elsa Yunara
BP/NIM : 2016/16060083
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

**Diketahui Oleh,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi**



Dr. Novva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Padang, November 2022
**Disetujui Oleh,
Pembimbing**



Isra Yeni, SE, M.SE
NIP. 19910212 201903 2 020

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

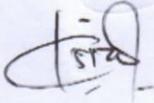
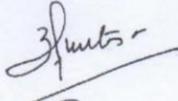
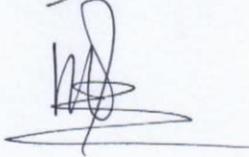
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI DAN POLITIK TERHADAP PEMBANGUNAN PEREMPUAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama : Elsa Yunara
BP/NIM : 2016/16060083
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji

| No | Jabatan | Nama | Tanda Tangan |
|----|---------|--------------------------------|--|
| 1 | Ketua | : Isra Yeni, SE, M.E | 1.  |
| 2 | Anggota | : Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.Si | 2.  |
| 3 | Anggota | : Dr. Muhammad Irfan, SE, M.Si | 3.  |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Elsa Yunara
NIM / Tahun Masuk : 16060083 / 2016
Keahlian : Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan
Departemen : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Maur Mudik, Jorong Kamp. Tengah Timur,
Nagari Salareh Aia, Kec. Palembayan, Kab. Agam
No. Hp : 082328793937
Judul Skripsi : Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi
dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan
di Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini Sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim penguji dan Ketua Departemen Ilmu Ekonomi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karenan karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 16 November 2022

Yang menyatakan,



Elsa Yunara

NIM. 16060083

ABSTRAK

Elsa Yunara 16060083/2016 : Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat, Dibawah Bimbingan Ibu Melty Roza Adry, SE, ME dan Ibu Isra Yeni, SE, M.SI

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dibutuhkan masyarakat yang mampu dan berdaya memenuhi kebutuhannya dan melepaskan diri dari kemiskinan, dilihat dari IPM perempuan selalu berada di bawah IPM laki-laki tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik dapat meningkatkan pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dengan metode Panel Least Squares (PLS) lalu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, dengan model regresi panel. Penelitian terhadap 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan rentang waktu 5 tahun. Hasil penelitian menunjukkan tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan, pengusaha perempuan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan, perempuan di parlemen berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Dapat disimpulkan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik sangatlah penting untuk pembangunan suatu Negara. Dari hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan dan kepada perempuan itu sendiri disarankan lebih mementingkan keterampilan, keahlian dan pendidikan sehingga tercapai pembangunan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan gender.

Kata Kunci : Pembangunan Perempuan, Pemberdayaan, Politik, Ekonomi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamiin, menjadi kata pembuka yang penulis ucapkan dengan limpahan rahmat, berkah, karunia dan kekuatan yang senantiasa tercurah dari Sang Khalik yang Maha Baik. Sehingga dengan limpahan tersebut penulis telah berhasil menuntaskan skripsi berjudul, "Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat". Penulisan skripsi adalah sebagai penyelesaian tugas akhir dalam pemenuhan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

Dalam proses menulis karya tulis berupa skripsi, penulis menyadari banyak mengalami kendala yang ditemui, namun berkat pertolongan Allah SWT serta bantuan, bimbingan, motivasi, dan kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Oleh karenanya penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada Ibu Melty Roza Adry, SE, ME dan Ibu Isra Yeni, SE, M.SI selaku pembimbing akademik yang sudah senantiasa sabar, tulus, ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran agar dapat memberi bimbingan, arahan, saran dan motivasi yang sangat membantu penulis selama menyusun skripsi. Berikutnya, penulis berterimakasih kepada:

1. Teristimewa keluarga, terutama orang tua tercinta yang selalu mengasihi, suami yang memberikan sejarah yang luar biasa dalam hidup, dan calon malaikat kecilku, serta kakak-kakak yang telah memberikan dukungan moril,

materil, kasih dan sayang, motivasi, dan doa sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Bapak Joan Marta, SE, M.Si selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
4. Dr. Sri Ulfa Sentosa, Dra, M.S selaku dosen penguji satu yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Dr. M. Irfan SE, M.Si selaku dosen penguji dua yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi tercinta yang sudah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
7. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberi masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menuntaskan misi skripsi ini dan membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
8. Kepada keponakan ku tersayang yang telah memberikan dukungan penuh Pujria Rahma Putri.

9. Rekan-rekan seperjuangan Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis berharap bagi penulis atau peneliti berikutnya apabila mengangkat topik yang sama untuk menyempurnakan apa yang belum sempat penulis selesaikan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi ladang ibadah bagi penulis.

Padang, Oktober 2022
Penulis,

Elsa Yunara

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS ... | 12 |
| A. Kajian Teori | 12 |
| B. Penelitian Terdahulu | 34 |
| C. Kerangka Konseptual | 36 |
| D. Hipotesis | 38 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Variabel Penelitian | 40 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| F. Definisi Operasional Variabel | 42 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 43 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian | 53 |
| B. Hasil Penelitian | 55 |
| C. Pembahasan..... | 82 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 89 |
| A. Kesimpulan | 89 |
| B. Saran..... | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |
| LAMPIRAN..... | 94 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Perkembangan Tenaga Profesional Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Pengusaha Perempuan dan Perempuan di Parlemen di Sumatera Barat Tahun 2017 sampai 2020..... | 7 |
| Tabel 4.1 Persentase Pembangunan Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021..... | 56 |
| Tabel 4.2 Persentase Tenaga Profesional Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021..... | 58 |
| Tabel 4.3 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021..... | 60 |
| Tabel 4.4 Persentase Pengusaha Perempuan di Sumatera Barat Tahun 2017-2021..... | 62 |
| Tabel 4.5 Persentase Perempuan di Parlemen di Sumatera Barat Tahun 2017-2021..... | 64 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji CEM..... | 67 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji FEM..... | 68 |
| Tabel 4.8 Hasil Uji REM..... | 69 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji <i>Chow</i> | 70 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji <i>Hausman</i> | 72 |
| Tabel 4.11 Hasil Estimasi Model Regresi Panel FEM..... | 73 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas..... | 79 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 79 |
| Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 80 |
| Tabel 4. 15 Hasil Uji Autokorelasi-DW..... | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017–2020..... | 4 |
| Gambar 2. 1 Distribusi pendapatan ketika pekerja berbeda dalam kemampuan... | 22 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perempuan merupakan bagian dari pembangunan manusia berbasis gender. Pembangunan perempuan memiliki dampak terhadap kualitas yang dimilikinya sehingga perempuan mampu menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan dan perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus dalam pengembangan sumber daya manusia dimasa mendatang. Pembangunan perempuan dengan kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030 sejalan dengan salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) (Kementerian PPPA, 2020). Meskipun saat ini upaya untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dalam pembangunan telah banyak dilakukan, namun kesenjangan gender masih terjadi.

Kesenjangan gender merupakan kondisi dimana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Dikarenakan perbedaan peran, tanggung jawab, kedudukan, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender diakibatkan oleh kondisi ketidakadilan dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut (BPS, 2022a).

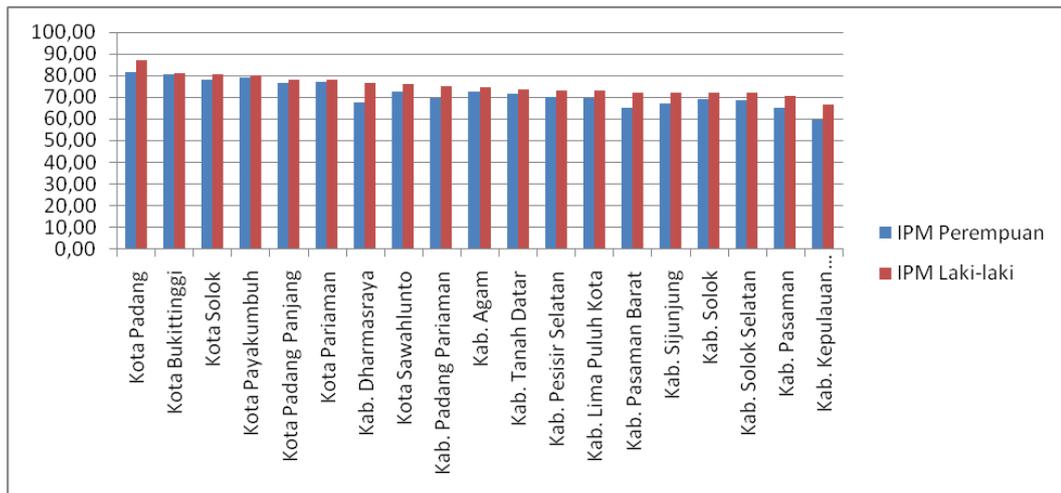
Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Klasen & Lamanna, 2009) pada tahun 1960-2000 di Negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Selatan menemukan bahwa ketimpangan gender dalam pendidikan dan ketenagakerjaan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan. Sementara itu, (Amory, 2019) dalam penelitiannya yang dilakukan di Sulawesi Barat pada tahun 2016-2018 menemukan bahwa ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan perempuan masih tinggi dan sangat jauh tertinggal dari laki-laki dikarenakan partisipasi rata-rata lama sekolah perempuan jauh dibawah laki-laki di Sulawesi Barat. (Aktaria & Handoko, 2012) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kalimantan Tengah pada tahun 2004-2007 juga menemukan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara ketimpangan gender yang diwakili oleh tiga indikator (*Gender Inequality Index (GII)*, *Gender Development Index (GDI)*, dan *Gender Empowerment Measure (GEM)*) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah provinsi Kalimantan tengah. Artinya semakin tinggi ketimpangan gender di wilayah Provinsi Kalimantan tengah maka pertumbuhan ekonominya semakin menurun, begitu juga sebaliknya semakin rendah ketimpangan gender di wilayah provinsi Kalimantan tengah maka pertumbuhan ekonominya semakin meningkat.

Sedangkan (Seguino, 2000) berpendapat lain tentang kesenjangan gender dalam upah, Seguino menyatakan bahwa kesenjangan upah antara perempuan dan laki-laki dalam pertumbuhan ekonomi di Asia memiliki dampak positif terhadap

ekspor. Upah yang diberikan kepada perempuan di industri ekspor melengkapi kebijakan NIC (Negara Industri Baru) tingkat pertama, yang mengarahkan investasi ke industri yang ditargetkan dan membantu perusahaan naik tangga. Yang akan memicu penjualan ekspor, pada akhirnya merangsang penyediaan devisa yang diperlukan bagi perekonomian ini.

Namun dengan demikian secara agregat ketimpangan gender di Indonesia masih sangat memprihatinkan, pada tahun 2020 ketimpangan gender di Indonesia sembilan belas provinsi dari tiga puluh empat Provinsi masih dibawah nasional, dengan *Indek Pembangunan Gender (IPG)* terendah Provinsi Papua sedangkan IPG tertinggi Provinsi DI Yogyakarta, pembangunan yang merata antar wilayah merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional (Kemenpppa, 2021), namun masih terdapat gap capaian manfaat hasil pembangunan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan dan kesehatan. Ini adalah fakta, meski ada kemajuan dalam kesetaraan gender akhir-akhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah/provinsi.

Salah satunya adalah provinsi Sumatera Barat, sebagai etnis minangkabau yang memiliki sistem sosial yang menempatkan perempuan pada posisi sentral. Seharusnya dengan sistem sosial ini kesetaraan gender dapat tercapai. Namun dalam kenyataannya, di Sumatera Barat kesetaraan gender belum dapat tercapai dengan baik. Salah satu buktinya dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia laki-laki dan perempuan kabupaten/ kota di Sumatera Barat.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/ Kota di Provisini Sumatera Barat Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa capaian indeks pembangunan manusia (IPM) perempuan dan laki-laki di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 belum merata. Dimana IPM tertinggi adalah kota padang, dengan IPM laki-laki sebesar 87,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 86,97 persen menandakan bahwa IPM laki-laki naik sebesar 0,08 persen. Sedangkan IPM perempuan sebesar 81,66 persen juga mengalami peningkatan sebesar 0,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya di angka 81,44 persen. Dengan IPM terendah adalah kabupaten kepulauan mentawai, dengan IPM laki-laki sebesar 66,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya meningkat dari 66,17 persen angka ini menandakan bahwa IPM laki-laki naik sebesar 0,26 persen dan IPM perempuan sebesar 59,66 persen juga mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya di angka 59,28 persen. Meskipun mengalami peningkatan pada tiap kabupaten/kota capaian IPM perempuan selalu berada di bawah IPM laki-laki Dimana hal ini menjadi bukti bahwa di Sumatera

Barat kedudukan perempuan masih belum setara dengan laki-laki. Kondisi ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial patriaki yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Salah satu penyebab utama rendahnya IPM perempuan adalah masih rendahnya kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun politik. Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun pekerja. Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik seperti dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri. Dengan hadirnya perempuan pasar tenaga kerja lebih kompetitif dan berwarna (Seguino, 2000).

Namun berdasarkan data (Tabel 1.1), kontribusi perempuan di pasar tenaga kerja masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Salah satunya pada tenaga kerja profesional, dari tahun 2017 hingga 2019 tenaga kerja profesional perempuan di Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 57,64% di tahun 2017 menjadi 55.36% pada tahun 2019. Namun, di tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 58.97%. Hal ini merupakan angka tertinggi sejak beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi provinsi peringkat pertama yang menyumbang tenaga profesional perempuan tertinggi di Indonesia. Dapat diartikan bahwa secara bertahap pemberdayaan gender di Indonesia, terutama di Sumatera Barat mengalami kemajuan.

Namun dilihat dari persentase sumbangan pendapatan perempuan di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami peningkatan yang

signifikan dari 37,40% di tahun 2017 menjadi 37,57% pada tahun 2020. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa secara bertahap pemberdayaan gender di Indonesia, terutama di Sumatera Barat mengalami kemajuan.

Namun dilihat dari persentase pengusaha perempuan di Sumatera Barat dari tahun 2017 hingga 2020 berfluktuasi, persentase pengusaha perempuan paling tinggi pada tahun 2018 sebesar 37,55% namun pada tahun selanjutnya turun hingga angka 34,97%, dalam empat tahun terakhir ini merupakan angka terendah. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 36,55%. Ini menandakan bahwa kesejahteraan perempuan di Provinsi Sumatera Barat ada peningkatan, namun peningkatannya belum stabil.

Faktor selanjutnya adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik (politik). Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan akan mendorong kesejahteraan kelompok perempuan. Dengan adanya perempuan di parlemen, maka ada perwakilan untuk mengawasi dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap gender (Rahmaniah Syarifah Ema, 2016).

Ditingkat nasional menurut hasil pemilu di tahun 2019, wakil perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya 20,87 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Sedangkan di tingkat daerah (di DPRD) sebesar 30,88 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil pemilu pada tahun 2014 sebesar 25,47 persen (BPS, 2021). Untuk di DPR angka ini masih jauh

dari harapan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mengamanatkan minimal 30 persen wakil perempuan di parlemen. Di Sumatera Barat sendiri, wakil perempuan di parlemen sangat jauh di bawah laki-laki.

Berdasarkan data persentase perempuan di parlemen di provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sampai 2020 lebih di dominasi oleh laki-laki. Anggota parlemen perempuan sangat jauh tertinggal jumlahnya dibandingkan dengan anggota parlemen laki-laki. Seperti yang terlihat pada tabel keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2017 sebesar 11% namun pada tahun 2020 keterlibatan perempuan menurun di angka 5%. Ini menandakan keterlibatan perempuan dalam politik masih sangat lemah, namun (Tusianti, 2021) mengatakan semakin banyaknya perwakilan perempuan di parlemen, maka kedudukan perempuan semakin kuat, termasuk untuk permasalahan yang dihadapi perempuan dapat disuarakan dan diselesaikan, terutama urusan kesejahteraan perempuan yang dipandang belum merata dan setara dengan laki-laki.

Tabel 1.1 Perkembangan Tenaga Profesional Perempuan, Sumbangan Pendapatan Perempuan, Pengusaha Perempuan dan Perempuan di Parlemen di Sumatera Barat Tahun 2017 sampai 2020

| Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Persentase Tenaga Profesional Perempuan | 57,64 | 55,48 | 55,36 | 58,97 |
| Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan | 37,40 | 37,48 | 37,51 | 37,57 |
| Persentase Pengusaha Perempuan | 35,94 | 37,55 | 34,97 | 36,55 |
| Persentase Perempuan di Parlemen | 11 | 11 | 5 | 5 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2021

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan suatu proses agar perempuan memiliki daya dan kekuatan untuk lebih berkualitas, dan menghilangkan ketergantungan serta melepaskan diri dari kemiskinan (Gerrity et al., 2007). Kesetaraan gender menjadi salah satu solusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, pencapaian kesetaraan gender artinya menghilangkan kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang (Arifin, 2018). Sedangkan, pemberdayaan perempuan dalam politik bermakna keterlibatan perempuan dalam dunia politik untuk menyampaikan permasalahan perempuan dan lebih memahami dalam membuat kebijakan yang pro perempuan serta berperan langsung dalam pengambilan keputusan yang adil bagi perempuan (World bank Report 2011, 2011). Sedangkan (Kertati, 2019) Menyatakan ada keterkaitan antara keterwakilan politik dengan pemberdayaan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen sebagai indikator bagi pencapaian IDG memberikan dampak positif terhadap pembangunan perempuan.

Berdasarkan fenomena ini, alasan penulis meneliti lebih lanjut dengan variabel independen yaitu tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan untuk mewakili pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, secara umum mampu memberikan dampak terhadap kualitas hidup perempuan itu sendiri dan variabel perempuan di parlemen untuk mewakili pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, dikarenakan mampu mendorong terciptanya kebijakan yang responsif gender yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pembangunan perempuan.

Dengan adanya emansipasi wanita mendorong wanita untuk bekerja sehingga memberikan kontribusi kepada pembangunan ekonomi suatu negara.

Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik sangat penting untuk dikaji kaitannya dengan kualitas perempuan secara umum. Namun, sangat sedikit sekali peneliti yang secara khusus melihat hubungan pemberdayaan perempuan dalam lingkup ekonomi dan politik. Hal ini menjadi landasan penulis tertarik menganalisis **“Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejauh mana pengaruh tenaga profesional perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat?
2. Sejauh mana pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat?
3. Sejauh mana pengaruh pengusaha perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat?
4. Sejauh mana pengaruh perempuan di parlemen terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat?

5. Sejauh mana pengaruh tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan dan perempuan di parlemen secara bersama-sama terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang:

1. Pengaruh tenaga profesional perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.
2. Pengaruh sumbangan pendapatan perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.
3. Pengaruh pengusaha perempuan terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.
4. Pengaruh perempuan di parlemen terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.
5. Pengaruh tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan dan perempuan di parlemen secara bersama-sama terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Penelitian ini menjadi salah satu implementasi keilmuan penulis dan menambah wawasan penulis tentang pengaruh pemberdayaan perempuan

dalam ekonomi dan politik terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat.

- b. Untuk melengkapi salah satu syarat yang harus diperlukan dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Sebagai referensi pengetahuan untuk pengembangan ilmu ekonomi sumber daya dan ilmu ekonomi pembangunan.

3. Bagi pihak lain

Dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah atau instansi terkait selaku pengambil kebijakan agar bisa melihat lebih cermat tentang pengaruh pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik terhadap pembangunan perempuan.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Ekonomi Pembangunan

(Todaro, 2011) pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat dalam menaikkan standar hidup, harga diri dan kebebasan individu. Dan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar baik dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, masyarakat berperan cukup besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yaitu sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan konsumen hasil pembangunan itu sendiri.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat dalam kehidupan sehingga dapat mempercepat pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan menanggulangi kemiskinan. Sehingga masyarakat harus berperan besar dalam mewujudkannya baik sebagai tenaga kerja, input pembangunan, dan output maupun konsumen hasil pembangunan itu sendiri agar hidup sejahtera.

Menurut Dudley Seers (Todaro, 2011) jika kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan telah menunjukkan penurunan, maka tidak diragukan lagi pembangunan disuatu negara tersebut telah menunjukkan tanda keberhasilan. Akan tetapi jika salah satu, atau dua kondisi tersebut apalagi ketiganya memburuk. Maka

sangat aneh untuk menyebutnya sebagai “pembangunan”, sekalipun pendapatan perkapita meningkat berlipat ganda.

(Todaro, 2003) dalam pembangunan ekonomi terdapat tiga nilai pokok penentu keberhasilan pembangunan suatu negara yaitu : (1) kemampuan masyarakat yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), artinya kecukupan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk menopang kehidupan mencakup makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. (2) rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat yang meningkat sebagai manusia, (3) dan kemampuan masyarakat untuk memilih meningkat (*freedom from servitude*) merupakan dimana suatu kondisi kebebasan yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat memiliki berbagai alternatif untuk memuaskan keinginannya dan dapat mengambil pilihan riil sesuai keinginannya.

Sehingga dapat dikatakan pembangunan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup yang merupakan arti pembangunan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi yang berkelanjutan pada tingkat individu dan masyarakat upaya mewujudkan potensi manusia tidak mungkin dapat dilakukan. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan pendapatan per kapita, peniadaan kemiskinan absolut, perluasan kesempatan kerja, dan pengurangan ketimpangan merupakan kondisi yang diperlukan bagi pembangunan.

Adapun tujuan pembangunan yang mencakup dalam kehidupan yang lebih baik (Todaro, 2011) yaitu: (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. (2) peningkatan standar hidup bukan hanya berupa

peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Sehingga meningkatkan kesejahteraan yang akan menumbuhkan harga diri individu dan bangsa. (3) perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada orang lain dan negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.

(Todaro, 2011) sejalan dengan tujuan dan sasaran MDG (*Millenium Development Goal*) yang disepakati oleh PBB sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai tujuan pembangunan manusia. Poin tiga dari delapan tujuan dan sasaran MDG adalah meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam kenyataannya menunjukkan bahwa kaum perempuan secara global lebih miskin dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan memiliki akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai bentuk kebebasan yang lebih sedikit. Selain itu, perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk mengasuh anak, dan sumber daya yang mereka miliki untuk memikul tanggung jawab untuk menentukan dapat atau tidaknya mereka memutus siklus pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perempuan juga meneruskan nilai-nilai penting kehidupan kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, agar dapat menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan, suatu masyarakat harus memberdayakan dan menginvestasikan sumber daya bagi kaum perempuannya.

Sehingga dapat disimpulkan untuk meniadakan kemiskinan dan mencapai pembangunan manusia salah satu cara dibutuhkan masyarakat yang berdaya, baik sebagai input maupun output dari pembangunan tersebut. salah satunya dengan cara meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, akan tetapi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa kaum perempuan secara global lebih miskin dibandingkan kaum laki-laki. Perempuan tidak hanya bekerja di sektor publik tetapi memiliki tanggung jawab utama di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga. perempuan memiliki tanggung jawab utama untuk mengasuh anak, dan sumber daya yang mereka miliki untuk memikul tanggung jawab untuk menentukan dapat atau tidaknya mereka memutus siklus pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perempuan juga meneruskan nilai-nilai penting kehidupan kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, agar dapat menghasilkan dampak pembangunan yang signifikan, suatu masyarakat harus memberdayakan dan menginvestasikan sumber daya bagi kaum perempuannya

2. Teori Pembangunan Modal Manusia

(Todaro, 2011) Modal manusia (*human capital*) merupakan investasi produktif terhadap individu mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, gagasan, kesehatan yang dihasilkan dari output bidang pendidikan, program pelatihan dalam pekerjaan, dan perawatan kesehatan. Sehingga jika hal tersebut ditingkatkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Jhingan (2003:414) pembentukan modal manusia adalah proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu

Negara. Pembentukan modal manusia dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya sebagai suatu sumber yang kreatif dan produktif dalam proses pertumbuhan ekonomi.

(Todaro, 2011) Investasi di bidang modal manusia yaitu investasi dalam pendidikan dan kesehatan dianalogikan seperti investasi konvensional dalam modal fisik. Dimana setelah dilakukan investasi awal, aliran pendapatan yang lebih tinggi dimasa yang akan datang dapat diperoleh dari perluasan pendidikan dan peningkatan kesehatan. Secara formal, keuntungan pendapatan yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\sum \frac{E_t - N_t}{(1+i)^t} \dots\dots\dots(2.1)$$

Dimana E merupakan pendapatan dengan pendidikan tambahan, N adalah pendapatan tanpa pendidikan tambahan, t adalah tahun, dan i adalah tingkat diskonto, dan penjumlahan selama usia produktif. Rumusan serupa berlaku untuk kesehatan (seperti dalam meningkatnya status nutrisi). Artinya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi memulai pekerjaan penuh waktu pada usia lebih tua namun pendapatan mereka dengan cepat melampaui pendapatan masyarakat dengan pendidikan rendah yang bekerja lebih awal.

Menurut Schultz dalam Jhingan (2003:414) ada lima cara pengembangan sumber daya manusia:

- a. Fasilitas dan pelayanan kesehatan pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga serta vitalitas rakyat.

- b. Latihan jabatan termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan.
- c. Pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.
- d. Program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan termasuk program ekstension khususnya pada pertanian.
- e. Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang sangat berubah.

(Todaro, 2011) namun kesenjangan gender dalam pendidikan dan kesehatan masih terjadi. Dilihat dari bukti empiris menunjukkan bahwa diskriminasi pendidikan terhadap perempuan selain menghambat pembangunan ekonomi juga memperbesar ketimpangan sosial. Upaya untuk memperkecil kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini juga sejalan dengan target dan tujuan MDG yang tertung pada poin tiga dan dua yaitu, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan mencapai pendidikan dasar universal. Secara ekonomis dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi kaum wanita sangat menguntungkan dengan alasan:

- a. Tingkat pengembalian (*rate of return*) dari pendidikan kaum wanita lebih tinggi daripada tingkat pengembalian pendidikan pria di kebanyakan negara berkembang.
- b. Peningkatan pendidikan wanita tidak hanya menaikkan produktivitasnya di lahan pertanian dan di pabrik, tetapi juga meningkatkan partisipasi tenaga

kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang lebih rendah, dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.

- c. Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.
- d. Karena kaum wanita memikul beban yang besar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat di negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status wanita melalui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.

(Todaro, 2011) UNDP Dalam mengukur kualitas hidup pembangunan manusia maka ukuran yang dapat digunakan adalah indeks pembangunan manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan suatu Negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan. Indeks pembangunan manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Adapun faktor - faktor yang dihitung yaitu:

1. Angka harapan hidup, yakni perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang sejak orang itu lahir.

2. Harapan lama sekolah, didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa yang akan datang.
3. Rata-rata lama sekolah, didefinisikan sebagai jumlah tahun yang akan digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
4. Pengeluaran perkapita, adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Nilai indeks pembangunan manusia berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara. Demikian pula sebaliknya, semakin mendekati 0 berarti kualitas sumber daya manusia di suatu negara tersebut masih sangat rendah.

IPM dapat diperingkat ke dalam empat kelompok yaitu; (1) pembangunan manusia rendah (0,0 sampai 0,49); (2) pembangunan manusia sedang (0,50 sampai 0,79); (3) pembangunan manusia tinggi (0,80 sampai 0,90); (4) pembangunan manusia sangat tinggi (0,90 sampai 1,0).

Dengan tujuan penting IPM sebagai indikator pembangunan manusia sebagai berikut :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia dalam suatu masyarakat.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level wilayah, apakah wilayah tersebut merupakan wilayah yang maju, berkembang, atau keterbelakang.

2. Teori Ketenagakerjaan

(BPS, 2022c) mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Sedangkan menurut undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa tenagakerja adalah penduduk yang berusia produktif (15 tahun keatas) yang mampu melakukan pekerjaan memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Secara garis besar ketenagakerjaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja (Pujoalwanto, 2014).

1. Tenaga Kerja

Penduduk dikategorikan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15 - 64 tahun dan dianggap dapat dan sanggup bekerja jika ada permintaan tenaga kerja.

2. Bukan Tenaga Kerja

Penduduk yang dikategorikan bukan tenaga kerja adalah mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun. Mereka dianggap tidak mampu dan tidak sanggup bekerja meskipun ada permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan kualitasnya tenagakerja dibedakan menjadi tiga golongan (Pujoalwanto, 2014), yaitu :

- 1) Tenaga Kerja Terdidik, merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada suatu bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal.
- 2) Tenaga Kerja Terlatih, tenaga kerja yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang didapatkan melalui pengalaman kerja sebelumnya ataupun pelatihan kerja.
- 3) Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih, biasanya adalah tenaga kerja kasar dengan mengandalkan tenaga sebagai modal utama.

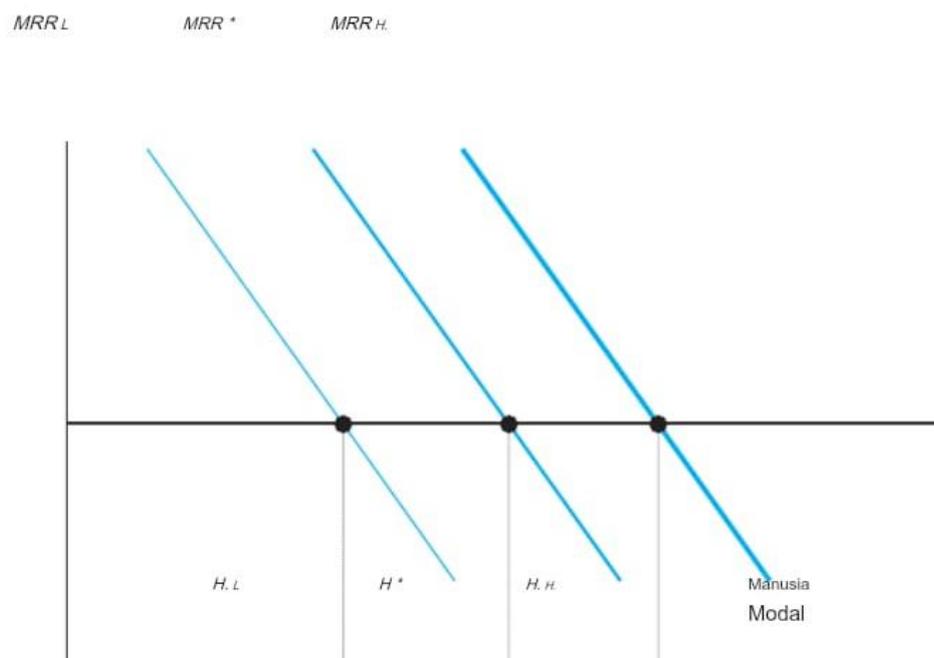
(Boediono, 2002) Tenagakerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam melaksanakan proses produksi. Dalam proses produksi tenagakerja memperoleh pendapatan sebagai balas jasa atau upah dari usaha yang telah dilakukannya. Dimana pendapatan di sektor modern lebih besar daripada sektor subsisten.

Menurut Lewis (Todaro, 2006, p. 132) sektor industri perkotaan modern tingkat produktivitasnya yang tinggi dapat penampungan tenagakerja lebih banyak yang di transfer sedikit demi sedikit dari sektor subsisten. Sehingga model ini diarahkan pada proses pengalihan tenagakerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenagakerja, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan.

(Todaro, 2003) Penyerapan tenagakerja merupakan penerimaan tenagakerja untuk melakukan pekerjaan atau tersedianya lapangan pekerjaan untuk siap diisi oleh pekerja. Penghasilan yang di dapat oleh tenagakerja di sektor modern lebih besar daripada di sektor tradisional, hal ini ditentukan oleh keterampilan yang

dimiliki pekerja dan produktivitasnya. Memiliki *human capital* yang tinggi membuat tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman sehingga membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

(George J. Borjas, 2013) Dapat dijelaskan menggunakan model sumber daya manusia membantu memahami karakteristik utama dari distribusi upah yang biasanya diamati dipasar tenaga kerja modern.



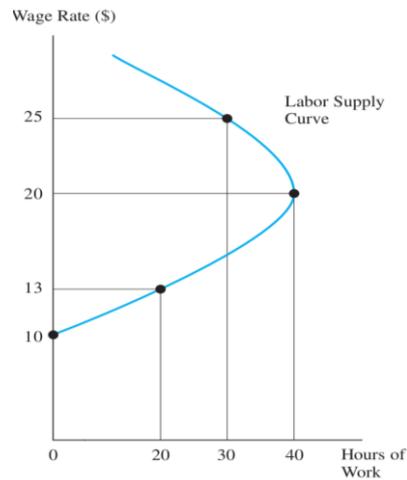
Gambar 2.1 Distribusi pendapatan ketika pekerja berbeda dalam kemampuan

Sebagai ilustrasi, sepertiga angkatan kerja terdiri dari pekerja berkemampuan rendah (MRR_L), sepertiga terdiri dari pekerja berkemampuan sedang (MRR^*), dan sepertiga sisanya terdiri dari pekerja berkemampuan tinggi (MRR_H). Misalnya semua pekerja memiliki tingkat diskon yang sama. Gambar 2.1 mengilustrasikan

keputusan investasi untuk pekerja disetiap kelompok kemampuan. Kurva MRR_L memberikan tingkat pengembalian marginal untuk pekerja berkemampuan rendah. Pekerja berkemampuan rendah menghadapi tingkat marjinal jadwal pengembalian MRR_L dan memperoleh H_L unit modal manusia. Pekerja dengan kemampuan tinggi menghadapi MRR_H dan dapatkan H_H unit modal manusia. Pekerja berkemampuan tinggi mendapatkan penghasilan lebih banyak daripada pekerja berkemampuan rendah. Baik karena mereka memiliki kemampuan lebih dan memperoleh lebih banyak modal manusia. Korelasi positif antara kemampuan dan modal manusia yang diperoleh menciptakan kemiringan positif.

Dapat disimpulkan bahwa selain modal manusia, tenagakerja dengan kemampuan tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi daripada tenagakerja yang memiliki kemampuan rendah. Dapat dikatakan kemampuan yang dimiliki tenagakerja sebagai karakteristik yang meningkatkan produktivitas dan meningkatkan pendapatan.

Dalam penawaran tenagakerja, semakin tinggi upah yang diberikan maka semakin banyak pula tenagakerja yang masuk dalam pasar tenagakerja sampai pada titik tertentu.



Gambar. Kurva Penawaran Tenaga Kerja

Kurva penawaran tenaga kerja menjelaskan hubungan tingkat upah dan jam kerja. Pada awalnya kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan yang positif namun pada titik tertentu kurva penawaran tenaga kerja memiliki kemiringan negatif. Artinya pada awalnya meningkatnya upah beriringan dengan meningkatnya jam kerja. Kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung kebelakang menunjukkan adanya pada tingkat upah meningkat tenaga kerja mengurangi waktunya untuk bekerja.

(George J. Borjas, 2013) Begitu juga dengan penawaran tenaga kerja perempuan lebih responsif terhadap perubahan upah daripada penawaran tenaga kerja laki-laki. Beberapa diantaranya:

- a. Keputusan partisipasi angkatan kerja perempuan didasarkan pada perbandingan upah pasar dengan upah reservasi. Sehingga, dengan kenaikan upah pasar meningkatkan partisipasi perempuan untuk bekerja sehingga membuat melahirkan anak lebih sedikit.
- b. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga dipengaruhi oleh

perubahan teknologi. Dengan adanya teknologi yang dapat menghemat waktu dalam proses produksi rumah tangga. Termasuk didalamnya kompor, mesin cuci, oven, robot pembersih rumah, dll. Sehingga bisa menghemat produktifitas waktu dalam pekerjaan rumah tangga.

- c. Selanjutnya faktor wanita menikah, wanita muda yang belum menikah dan penggunaan kontrasepsi juga berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja wanita.

Karena perubahan besar dalam pasokan tenaga kerja perempuan yang disaksikan dalam beberapa dekade terakhir, persepsi bahwa penawaran tenaga kerja perempuan lebih elastis daripada penawaran tenaga kerja laki-laki (George J. Borjas, 2013).

Sedangkan (Washington, 2005) Alokasi sumberdaya dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan telah terdapat perbedaan peran gender. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan dibebani tanggung jawab domestik. Tugas kerumahtanggaan perempuan umumnya lebih lama daripada laki-laki. Mempunyai pengalaman diangkat kerja lebih sedikit, sehingga berpenghasilan lebih kecil. Hampir semua Negara, baik Negara maju maupun Negara berkembang pembagian gender tampak konsisten di sektor ketenagakerjaan. Laki-laki banyak bekerja diluar rumah dan perempuan lebih banyak di rumah (UNDP, 1995). Selain itu, perempuan sering merangkap lebih banyak kegiatan mengasuh anak, mengerjakan tugas rumahtangga, dan mencari penghasilan dirumah atau diladang (Flora, 1995). Bahkan walau juga bekerja di sektor upah pun perempuan tetap melakukan sebagian besar pekerjaan tanpa upah dirumah.

(Washington, 2005) Selain itu, lebih rendahnya pendidikan perempuan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja biasanya menyebabkan lebih rendahnya penghasilan perempuan, sehingga membatasi kemampuan perempuan untuk mempengaruhi keputusan alokasi sumberdaya dan investasi di rumah. Akan tetapi, hal ini “tidak terlihat” dan tidak diperhitungkan para pembuat kebijakan. Sehingga kegagalan menyadari perbedaan gender dalam alokasi waktu dan kerja rumahtangga bisa mempengaruhi efektifitas kebijakan sehingga tidak mencapai tujuan atau malah berakibat yang tidak diinginkan. Dengan kata lain meningkatnya kebutuhan pekerja perempuan tidak dapat diikuti oleh ketersediaan pasokan tenaga kerja perempuan yang diharapkan, karena perempuan tidak dapat mengurangi waktu untuk urusan rumah tangga.

(Washington, 2005) Pembangunan ekonomi menciptakan insentif dan peluang yang dapat menghapus pemilihan gender dalam peran ekonomi, sehingga memungkinkan perempuan berpartisipasi setara dengan laki-laki dalam pasar ekonomi (tidak hanya dikala resesi ekonomi saja) dan laki-laki bisa ikut berbagi peran dalam urusan rumahtangga. Pertumbuhan ekonomi bisa meringankan beban rumahtangga perempuan, memberi mereka waktu istirahat lebih panjang serta pilihan untuk melibatkan diri dalam pasar kerja. Hal ini juga memungkinkan laki-laki mengurangi beban pasar kerja mereka dan memungkinkan mereka lebih terlibat dalam kegiatan non-pasar. Pembangunan ekonomi menciptakan perubahan dalam struktur ketenagakerjaan dan produktivitas pekerja.

3. Teori Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tujuan penting dari perspektif hak asasi manusia, serta untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seperti peningkatan ketahanan pangan, gizi anak dan pendidikan (Kabeer, 1999). (Quisumbing et al., 2021) Dalam penelitiannya dalam pemberdayaan perempuan menekankan pentingnya memiliki data laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak hanya memeriksa paritas gender dalam rumah tangga saja, untuk lebih lanjut melibatkan laki-laki dan perempuan dalam intervensi sehingga dapat mengubah norma dan dinamika gender yang berbahaya dan mempromosikan hasil yang lebih berkeadilan gender.

3.1 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka panjang akan tetapi belum cukup untuk memberikan hasil yang diinginkan. Diperlukan dukungan kelembagaan yang memberikan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki serta kebijakan untuk menangani ketidaksetaraan yang berkepanjangan (Washington, 2005). Ada tiga strategi untuk meningkatkan kesetaraan gender, yaitu:

- a. Reformasi institusi guna menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki, diperlukan revolusi hukum terutama dalam

undang-undang keluarga, perlindungan terhadap kekerasan, hak atas tanah, kesempatan kerja, serta hak-hak politik.

- b. Mendukung pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat insentif bagi peningkatan kesetaraan sumber daya dan aspirasi, pendapatan yang meningkat dan tingkat kemiskinan yang menurun cenderung mengurangi disparitas gender dalam bidang pendidikan, kesehatan dan gizi. Serta produktifitas yang meningkat dan kesempatan kerja akan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- c. Mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi disparitas yang berkepanjangan dalam penguasaan sumber daya dan aspirasi. Karena reformasi institusi dan pembangunan ekonomi mungkin tidak memadai atau memakan waktu lama, diperlukan langkah-langkah aktif untuk mengatasi masalah disparitas gender dalam jangka pendek dan menengah.

3.2 Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan turunan dari pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kepemimpinan, membangun jaringan, memberi dukungan informasi dan analisis anggota masyarakat, organisasi dan lembaga sosial yang sudah ada.

(DIY, 2017) Pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. tujuan ini

adalah untuk memberdayakan perempuan melalui kemandirian perempuan dan memperkuat kemampuan mereka untuk melakukan negosiasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (Zubaedi, 2013).

(Zimmerman et al., 2021) Pembangunan pemberdayaan (*empowerment*) sangatlah kompleks melibatkan proses interaksional yang mengambil berbagai bentuk termasuk kemampuan untuk mempengaruhi orang lain (*power over*), kemampuan untuk bersatu dengan orang lain untuk melakukan tindakan kolektif (*power with*) atau kemampuan untuk bertindak. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis fokus pada kemampuan perempuan dalam bidang ekonomi dan politik seperti kemampuan bersaing tenaga kerja profesional perempuan, perempuan di parlemen, pengusaha perempuan dan kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga yang disebut dengan sumbangan pendapatan perempuan serta kontribusi perempuan di parlemen.

Jadi dapat disimpulkan perempuan dapat dikatakan berdaya apabila mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah dalam memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri dalam proses pengambilan keputusan.

a. Pengaruh Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Terhadap Pembangunan Perempuan

(Todaro, 2003) Dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara salah satunya kemampuan masyarakat yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya serta rasa harga diri masyarakat yang meningkat. Dengan memiliki *human capital* yang tinggi membuat tenaga kerja memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dapat membuat tenaga kerja menjadi lebih produktif dan dapat menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Sejalan dengan (George J. Borjas, 2013) selain modal manusia, tenaga kerja perempuan dengan kemampuan tinggi mendapatkan upah yang lebih tinggi dari pada tenaga kerja yang memiliki kemampuan rendah.

Dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja profesional perempuan termasuk dalam pekerjaan layak, sehingga kedudukan tenaga kerja perempuan mempunyai kedudukan strategis dalam pengambilan keputusan. Semakin banyak tenaga kerja profesional perempuan baik kuantitas maupun kualitasnya, maka pemberdayaan perempuan tersebut meningkat sehingga akan meningkatkan pembangunan perempuan itu sendiri, (Todaro, 2011) sejalan dengan tujuan dan sasaran MDG (*Millenium Development goal*) mencapai pembangunan manusia salah satunya dengan meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

b. Pengaruh Sumbangan Pendapatan Perempuan Terhadap Pembangunan Perempuan

Sumbangan pendapatan perempuan merupakan suatu kemampuan perempuan berperan dan berkontribusi secara finansial dalam keluarga. Sejalan

dengan penelitian (Danquah et al., 2021) menemukan bahwa pengurangan kesenjangan upah gender rumah tangga secara signifikan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Bahkan dengan penurunan kesenjangan upah gender rumah tangga menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga dan peningkatan kesejahteraan perempuan.

Dalam penelitian lain (Sangwan & Kumar, 2021) menemukan bahwa efek positif dari peningkatan hari kerja berbayar perempuan meningkat akan mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga karena di dorong oleh pendapatan perempuan yang lebih baik. Artinya semakin tinggi pendapatan perempuan akan semakin tinggi sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan keluarga.

Sumbangan pendapatan perempuan juga mengindikasikan adanya kemandirian perempuan dalam keluarga yang dapat berdampak pada relasi yang lebih setara dan kemampuan kontrol yang otonom. (Kertati, 2021) dalam penelitiannya menemukan kontribusi pendapatan perempuan dalam pendapatan keluarga masih sedikit atau belum menguat untuk IPG di kota Surakarta. Akan tetapi partisipasi perempuan dalam penciptaan pendapatan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini mengindikasikan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang tentunya akan meningkatkan IPM perempuan.

Dari beberapa penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sumbangan pendapatan perempuan dalam pendapatan keluarga menandakan keberdayaan perempuan secara finansial, dengan meningkatnya ketenagakerjaan berbayar perempuan mengindikasikan tenaga kerja perempuan memiliki peran besar dalam

meningkatnya sumber daya manusia yang tentunya meningkatkan pembangunan perempuan.

c. Pengaruh Pengusaha Perempuan Terhadap Pembangunan Perempuan

(K Seh Young, 2021) Tenaga kerja perempuan memiliki efek yang sangat signifikan dalam semua analisis tingkat makro dan mikro. Oleh karena itu, menciptakan peluang kerja bagi perempuan untuk memenuhi permintaan sangat membantu meningkatkan kesejahteraan perempuan. Perempuan sebagai pengusaha berarti suatu pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, ataupun berusaha dibantu buruh tetap.

Dalam penelitian (Rana Ismail Alsaad, 2022) yang dilakukan di Bahrain menemukan bahwa pemberdayaan perempuan sebagai pengusaha sangat penting untuk memulai bisnis dan berhasil. Sehingga kewirausahaan perempuan berkontribusi pada pembangunan Negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Perempuan sebagai pengusaha mempunyai inisiasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus bergantung dengan orang lain. (Tusianti, 2021) dalam penelitiannya menemukan pengaruh pengusaha perempuan positif dan signifikan terhadap IPM perempuan. Perempuan sebagai pengusaha mampu lebih mandiri dan mempunyai penghasilan sendiri. Meningkatnya persentase perempuan sebagai pengusaha akan mendorong meningkatnya pendapatan perempuan itu sendiri yang tentunya akan meningkatkan IPM perempuan.

Akan tetapi (Elson, 1999) Pasar tenaga kerja membuat perempuan menggabungkan pekerjaan berbayar dengan pekerjaan tidak berbayar seperti

pekerjaan paruh waktu dan pekerjaan rumahan, adaptasi ini umumnya dirancang untuk ekonomi produktif karena tenaga kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja dibatasi oleh tanggung jawab domestik. Biasanya jenis pekerjaan lebih informal yaitu tidak memiliki kontrak yang memberikan pekerja hak atas waktu yang diberikannya. Meskipun ada peningkatan dalam survey statistik, banyak kegiatan ekonomi perempuan masih belum terlihat. Meskipun kegiatan ekonomi diakui secara publik namun orang yang melakukannya dibayar tunai atau hanya sebagai tenaga kerja yang tidak dibayar dalam bisnis berbasis keluarga.

d. Pengaruh Perempuan di Parlemen Terhadap Pembangunan Perempuan

(Kementerian PPPA, 2020) menyatakan bahwa posisi perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang politik sangat penting karena akan memberikan peluang dipertimbangkannya suara, kepentingan, dan kebutuhan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang berkeadilan gender. Keterlibatan perempuan di dunia politik Indonesia sudah didorong sejak lama dengan kebijakan *affirmative action* dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling sedikit 30 persen calon perempuan. Akan tetapi upaya yang telah dikuatkan oleh sejumlah regulasi ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Penelitian (Yuslin Hasnidar, 2021) menemukan adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen berharap tidak ada lagi kebijakan yang bias gender, namun pada realitasnya sektor politik di Indonesia masih di dominasi oleh laki-laki. Yang menunjukkan rata-rata keterlibatan perempuan pada tahun 2010 hingga tahun 2020 hanya berkisar sebesar 18,12 persen, angka ini masih jauh dari kuota keterwakilan perempuan dalam parlemen sebesar 30 persen.

Menurut (Kertati, 2019) menemukan bahwa ada relasi antara keterwakilan politik perempuan dengan pemberdayaan perempuan. apabila perempuan ada di kursi legislatif dapat menghasilkan hukum dan peraturan yang komprehensif dalam membela dan menyelesaikan permasalahan kaumnya.

Jadi dapat disimpulkan perwakilan perempuan di parlemen dapat mendorong kesejahteraan perempuan, yang diawali dengan menyuarakan permasalahan atau persoalan-persoalan yang dialami perempuan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkeadilan gender. Maka hal ini dapat meningkatkan pembangunan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh, sehingga tercapainya kesetaraan gender.

B. Penelitian Terdahulu

Menurut (Tusianti, 2021) dalam penelitiannya menggunakan sampel 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan tahun penelitian 2017. Menemukan bahwa persentase perempuan sebagai pengusaha, dan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM perempuan di Indonesia. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa saat persentase perempuan sebagai pengusaha meningkat 1 persen, maka nilai IPM perempuan akan naik sebesar 0,206. Begitu juga dengan persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi, dan teknisi meningkat 1 persen maka nilai IPM perempuan akan naik sebesar 0,298. Ini membuktikan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap kualitas hidup perempuan secara umum.

Menurut (Danquah et al., 2021) dalam penelitiannya di Ghana di Afrika

sub-Sahara dengan menggunakan metode IV LASSO menggunakan data *cross sectional* menemukan bahwa perbedaan upah gender dalam rumah tangga terhadap pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga dan kesejahteraan perempuan, menggunakan kumpulan data rumah tangga mikro gelombang terbaru di Ghana. Menemukan bahwa pengurangan kesenjangan upah gender rumah tangga memiliki dampak yang substansial dan positif terhadap pemberdayaan perempuan. Begitu pula sebaliknya penurunan kesenjangan upah gender rumah tangga menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan rumah tangga dan kesejahteraan perempuan. Artinya pengurangan kesenjangan upah gender rumah tangga akan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Menurut (Niyonkuru & Barrett, 2021) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan keadilan sosial dan transformatif dengan metodologi interpretatif dan kualitatif. Dengan melibatkan 126 wanita dan 48 laki-laki di pedesaan Rwanda. Mengeksplorasi hubungan gender yang ada ditingkat rumah tangga di pedesaan Rwanda menunjukkan bahwa jika pemberdayaan perempuan dalam ekonomi ingin mencapai potensi penuhnya, maka mereka harus mengatasi norma, budaya dan struktural yang mendukung ketidaksetaraan gender baik di tingkat rumah tangga maupun masyarakat.

Menurut (Saputra, 2020) dalam penelitiannya yang dilakukan dilampung teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan DPD partai demokrat lampung, buku dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dimulai dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan yang dilakukan DPD partai demokrat lampung adalah rekrutmen kader perempuan, pendidikan dan pelatihan kader, dan memberikan dukungan administrasi. Dengan faktor pendukung pemberdayaan perempuan adalah adanya dukungan dari Pemerintahan Lampung, dukungan dari organisasi-organisasi perempuan yang mendukung, serta kekompakan internal partai demokrat. Namun adapula faktor penghambat yaitu kurangnya minat perempuan berpolitik, kurangnya pemahaman perempuan terkait politik, dan perempuan memiliki waktu yang lebih pendek dibandingkan laki-laki.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan suatu konsep yang menjelaskan, mengungkapkan, dan menunjukkan persepsi keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat dari teori yang telah dikemukakan dalam kajian teori yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah.

Penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan politik terhadap pembangunan perempuan di provinsi Sumatera Barat. Dengan variabel penelitian tenaga profesional perempuan (TPP), sumbangan pendapatan perempuan (SPP), pengusaha perempuan (PP), perempuan di parlemen (PdP) sebagai variabel bebas, pembangunan perempuan (PemP) sebagai variabel terikat.

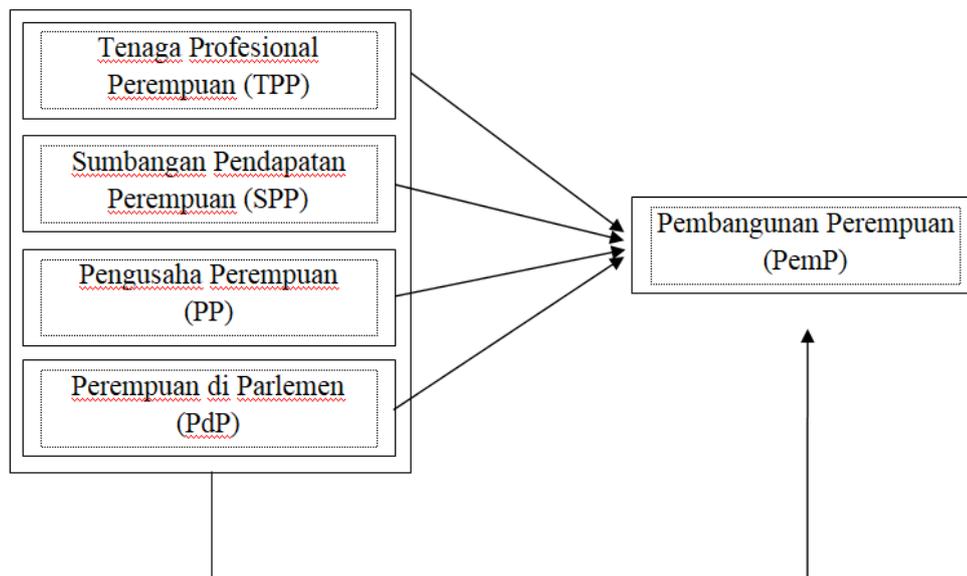
Tenaga profesional perempuan (TPP) berpengaruh positif terhadap pembangunan perempuan (PemP) di provinsi Sumatera Barat. Dimana ketika tenaga profesional perempuan meningkat maka pendapatan perempuan juga akan

meningkat, hal ini dapat meningkatkan mutu dan hidup layak perempuan yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan perempuan.

Sumbangan pendapatan perempuan (SPP) berpengaruh positif terhadap pembangunan perempuan (PemP) di provinsi Sumatera Barat. Dimana ketika banyak perempuan yang bekerja dalam keluarga maka menandakan kesejahteraan perempuan meningkat yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan perempuan.

Pengusaha perempuan (PP) berpengaruh positif terhadap pembangunan perempuan (PemP) di provinsi Sumatera Barat. Dimana ketika persentase pengusaha perempuan meningkat akan mendorong meningkatnya pendapatan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan itu sendiri yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan perempuan.

Perempuan di parlemen (PdP) berpengaruh positif terhadap pembangunan perempuan (PemP) di provinsi Sumatera Barat. Pemberdayaan perempuan di dalam politik, dapat meningkatkan aspirasi perempuan dalam penyusunan dan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undang yang berkeadilan gender. Sehingga meningkatkan mutu dan hidup layak perempuan yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan perempuan. Untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan terikat dapat terlihat pada kerangka konseptual sebagai berikut :

A
Gc

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Pengaruh Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang berdasarkan kerangka konseptual, bersifat sementara yang dibuktikan kebenarannya setelah data empiris diperoleh.

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tenaga profesional perempuan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Sumbangan pendapatan perempuan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Pengusaha Perempuan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Perempuan di Parlemen diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

5. Tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan, perempuan di parlemen secara bersama-sama diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Provinsi Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$$

$$H_a : \text{salah satu koefisien} \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tenaga Profesional Perempuan (TPP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Hal ini berarti jika semakin meningkat jumlah tenaga profesional perempuan, maka akan menyebabkan pembangunan perempuan di Sumatera Barat mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.
2. Sumbangan Pendapatan Perempuan (SPP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Hal ini berarti jika sumbangan pendapatan perempuan meningkat dalam keluarga, menggambarkan keberdayaan perempuan dalam ekonomi sudah meningkat. Maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat mengalami peningkatan dan begitu sebaliknya.
3. Pengusaha Perempuan (PP) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan sebagai pengusaha merupakan pekerjaan yang masuk ke sektor informal, ternyata belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan. Walaupun menjadi pengusaha, dia hanya menjadi pengusaha yang belum berdaya. Pengusaha yang memiliki keterampilan minim, dan akses kepada sarana permodalan yang belum bagus. Akan tetapi ketika keterlibatan perempuan sebagai pengusaha hasilnya

negatif menandakan keterlibatan perempuan sebagai pengusaha begitu besar berefek terhadap pembangunan perempuan. Bahkan pemerintah memberikan bantuan dan pelatihan kepada pelaku pengusaha tersebut agar bisa menjadi pengusaha yang berdaya.

4. Perempuan di Parlemen (PdP) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat. Apabila jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan, maka pembangunan perempuan di Sumatera Barat juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya namun tidak signifikan. Dikarenakan di Sumatera Barat rata-rata keterlibatan perempuan di parlemen baru 7.87 persen, sedangkan yang ditargetkan pemerintah keterlibatan perempuan di parlemen 30 persen. Saat proporsi perempuan di parlemen sudah lebih 30% saat itulah kita berharap kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan anggaran berpihak kepada perempuan. Sehingga isu-isu dan permasalahan-permasalahan perempuan bisa di wakikan kepada perempuan yang ada di parlemen.
5. Tenaga profesional perempuan, sumbangan pendapatan perempuan, pengusaha perempuan, perempuan di parlemen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan perempuan di Sumatera Barat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan dan dari hasil penelitian serta hasil kesimpulan yang diperoleh maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih fokus kepada pemberdayaan perempuan sebagai pengusaha agar tepat sasaran sehingga bisa menjadi pengusaha yang berdaya.
2. Sebaiknya perempuan harus menyadari pentingnya mempunyai pendidikan dan keahlian, semakin tinggi pendidikan dan keahlian makin tinggi peluang bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan pendapatan yang tinggi tentunya serta meningkatkan taraf hidup nantinya. Maka dari itu setiap perempuan harus terus didorong agar dapat meningkatkan pendidikan hingga perguruan tinggi.
3. Perlunya peningkatan kesadaran berpolitik di kalangan perempuan, agar semakin banyak perwakilan perempuan di parlemen. Sebab keberadaan perempuan di parlemen dapat menyuarakan aspirasi kaumnya.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan referensi serta menambahkan variabel lain yang tidak terdapat dalam model penelitian, supaya memperoleh hasil penelitian yang lebih baik guna memberikan saran kebijakan bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- aktaria, E., & Handoko, B. S. (2012). Ketimpangan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 194.
- Amory, J. D. S. (2019). Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan Di Sulawesi Barat Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Gender Equality And Economic Growth In Indonesia
- Bps. (2021). *Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (Persen), 2019-2020*. Bps Pusat.
- Bps. (2022a). *Gender*. Badan Pusat Statistik.
- Bps. (2022b). *Kependudukan*. Badan Pusat Statistik.
- Bps. (2022c). *Tenaga Kerja*. Badan Pusat Statistik.
- Danquah, M., Malik, A., Owusu, E., & Owusu, S. (2021). Do Gender Wage Differences Within Households Influence Women's Empowerment And Welfare ? Evidence From Ghana. *Journal Of Economic Behavior And Organization*, 188, 916–932.
- Diy, B. (2017). *Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat*.
- Elson, D. (1999). *Labor Markets As Gendered Institutions : Equality , Efficiency And Empowerment Issues*. 27(3), 611–627.
- George J. Borjas. (2013). *Labor Economics* (6th Ed., Pp. 305–334). Douglas Reiner.
- Gerrity, J. C., Osborn, T., & Mendez, J. M. (2007). Women And Representation: A Different View Of The District? *Politics And Gender*, 3(2), 179–200.
- Herlina, E. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja Wanita Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Kabupaten Cirebon*.
- K Seh Young. (2021). Determining Critical Factors Of Gender Inequality: Evidence From 34 Oecd And Non-Oecd Countries. *World Development Perspectives*, 21.
- Kabeer, N. (1999). *Resources, Agency, Achievements: Reflections On The Measurement Of Womens Empowerment*.
- Kemenag Sumbar. (2011). *Tentang Sumatera Barat*. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.
- Kemenpppa. (2021). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021*.
- Kementerian Pppa. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. In *Kemntrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* (Vol. 8, Issue 1).
- Kertati, I. (2019). Kontribusi Keterwakilan Perempuan Di Legislatif Dalam Indeks Pembangunan Gender (Idg). *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(1), 62–72.
- Kertati, I. (2021). Analisis Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Dan Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Kota Surakarta. *Public Service And Governance Journal*, 2(01), 1.
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The Impact Of Gender Inequality In Education